

## ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN REALISASI BELANJA APBD TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA MANADO PERIODE 2007 – 2021

Brilliant A.M Lengkey<sup>1</sup>, Agnes L. Ch. P. Lapian<sup>2</sup>, Dennij Mandej<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> *Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia  
E-mail : lengkeybrilian@gmail.com*

### ABSTRAK

Pengangguran merupakan masalah yang dihadapi hampir semua daerah termasuk Kota Manado yang merupakan ibukota provinsi Sulawesi Utara pun tidak luput dari masalah pengangguran ini. Pengangguran merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di kota Manado dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran diantaranya adalah tingkat inflasi dan jumlah belanja APBD yang dikeluarkan. Dengan semakin tingginya tingkat inflasi maka akan berpengaruh pada tingkat pengangguran yang semakin besar belanja APBD yang dikeluarkan diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh inflasi dan realisasi belanja APBD terhadap pengangguran di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Manado dan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kota Manado. Realisasi belanja APBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado.

**Kata Kunci:** Kota Manado; Inflasi; Belanja APBD; Pengangguran.

### ABSTRACT

*Unemployment is a problem faced by almost all regions including Manado city, which is the capital of North Sulawesi province. Unemployment is an important issue in economic development in the city of Manado and several factors that can affect the magnitude of the unemployment rate include the inflation rate and the amount of APBD expenditure issued. With the higher inflation rate, it will affect the unemployment rate, the greater the APBD expenditure is expected to be able to reduce the unemployment rate. The purpose of the research is to determine the effect of inflation and the realization of APBD expenditure on unemployment in Manado City. The type of research used by the author is descriptive quantitative research, and the type of data used is secondary data obtained from BPS Manado City and BPS North Sulawesi Province. In this study using Multiple Regression analysis model. The results of this study indicate that inflation has a negative and insignificant effect on unemployment in Manado City. The realization of APBD expenditure has a negative and significant effect on the unemployment rate in Manado City.*  
**Keywords:** Manado City; Inflation; APBD Expenditure; Unemployment.

## 1. PENDAHULUAN

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2015). Pengangguran terjadi karena tingginya perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja dan kesediaan lapangan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga barang dalam periode waktu tertentu (Sukirno, 2015). Dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran.

Menurut Badrudin (2011) “Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan

dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, diantaranya adalah jumlah penerimaan, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka Panjang dan pertimbangan politik dan keamanan (Sukirno, 2015). Salah satu klasifikasi pengeluaran pemerintah adalah pelayanan publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik.

**Tabel 1. Tingkat Inflasi dan Realisasi Belanja APBD Serta Tingkat Pengangguran di Kota Manado Tahun 2007-2021**

| Tahun | Tingkat Inflasi | Realisasi Belanja APBD<br>(milyar) | Tingkat Pengangguran |
|-------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| 2007  | 9,71%           | Rp 520.43                          | 19,53%               |
| 2008  | 2,31%           | Rp 616.81                          | 14,97%               |
| 2009  | 6,28%           | Rp 693.74                          | 15,38%               |
| 2010  | 10,13%          | Rp 678.49                          | 13,91%               |
| 2011  | 0,67%           | Rp 876.63                          | 11,48%               |
| 2012  | 6,04%           | Rp 929.71                          | 10,85%               |
| 2013  | 8,12%           | Rp 1087.44                         | 8,78%                |
| 2014  | 9,67%           | Rp 1283.77                         | 9,59%                |
| 2015  | 5,56%           | Rp 1479.00                         | 14,28%               |
| 2016  | 0,35%           | Rp 1812.42                         | 7,13%                |
| 2017  | 2,44%           | Rp 1546.03                         | 9,35%                |
| 2018  | 3,83%           | Rp 1546.55                         | 10,38%               |
| 2019  | 3,52%           | Rp 1623.08                         | 10,12%               |
| 2020  | -0,18%          | Rp 1519.74                         | 13,88%               |
| 2021  | 2,65%           | Rp 1322.30                         | 12,17%               |

Sumber: BPS Kota Manado Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran kota Manado naik dari 7,13% pada tahun 2016 dan naik setiap tahunnya hingga pada 2020 naik ke angka 13,88%, dari angka pengangguran yang masih tergolong besar ini dapat terlihat bahwa program yang telah dijalankan oleh pemerintah belum dapat menekan tingkat pengangguran yang ada. Kota Manado merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, dimana pusat pemerintahan dan pusat perdagangan barang dan jasa yang baik, tetapi tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kota Manado masih tinggi. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado.
2. Mengetahui pengaruh Realisasi Belanja APBD terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado.
3. Untuk Mengetahui pengaruh inflasi dan Realisasi Belanja APBD terhadap pengangguran di Kota Manado.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain kebutuhan/peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2014).

Bratakusumah (2004) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah juga perlu membuat peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah agar pemahaman konsep mengenai keuangan daerah tidak mengalami ketimpangan. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bentuk dari pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dari Pemerintah Pusat yang diikuti dengan pemberian dana. Pelaksanaan keuangan daerah tersebut berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2.2 Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai pengangguran. Seorang anak keluarga kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai penganggur. Ibu rumah tangga dan anak orang kaya tersebut disebut penganggur sukarela (Sukirno, 2015).

Menurut Mankiw (2018), seseorang yang sedang menunggu panggilan pekerjaan dimana tempat dia dulu bekerja dan telah diberhentikan juga disebut sebagai pengangguran. Pengangguran memiliki kategori yang meliputi orang sedang tidak memiliki pekerjaan, mampu bekerja tetapi susah mendapatkannya dalam jangka waktu 4 (empat) minggu.

Istilah pengangguran selalu dikaitkan dengan Angkatan kerja (labor force). Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk; (a) berusia antara 15 s/d 65 tahun, (b) mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja, (c) serta sedang mencari pekerjaan. Meskipun orang yang tidak memerlukan lagi pekerjaan karena sudah mempunyai kekayaan yang banyak, ibu-ibu rumah tangga, dan orang yang masih sekolah atau kuliah. Dengan demikian yang disebut angkatan kerja adalah dapat digolongkan sebagai berikut (Murni, 2016).

1. Bekerja (*Employed*), semua orang yang mempunyai pekerjaan dan bekerja apa saja sehingga dapat memperoleh penghasilan dan;
2. Tidak bekerja (*Unemployed*), orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan, tapi sedang mencari pekerjaan.

## 2.3 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga secara terus menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Kecuali secara meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain (Susanto, 2017). Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga (Putong, 2010).

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya, harga barang-barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya. Karena ketika lebaran usai harga barang ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi (Rozalinda, 2014).

## 2.4 Belanja APBD

Belanja daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Sukirno (2015) jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, diantaranya adalah jumlah penerimaan, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu:

1. Aparatur daerah yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintah sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.
2. Pelayanan Publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dana kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sambaulu, Rotinsulu dan Lopian (2022) yang menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, upah minimum dan inflasi terhadap pengangguran di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota Manado dan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Dalam penelitian ini menggunakan model analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, upah minimum dan inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Secara simultan jumlah penduduk, upah minimum dan inflasi berpengaruh terhadap pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Rotinsulu, Tenda dan Luciana (2016) tentang Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa pengaruh pemerintah melalui APBD nya dalam meningkatkan pertumbuhan, menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten, Kota di wilayah Sulawesi Utara. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier yang digunakan untuk melihat pengaruh APBD terhadap pengeluaran Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan Pengangguran. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 21.00. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan serta penurunan tingkat pengangguran.

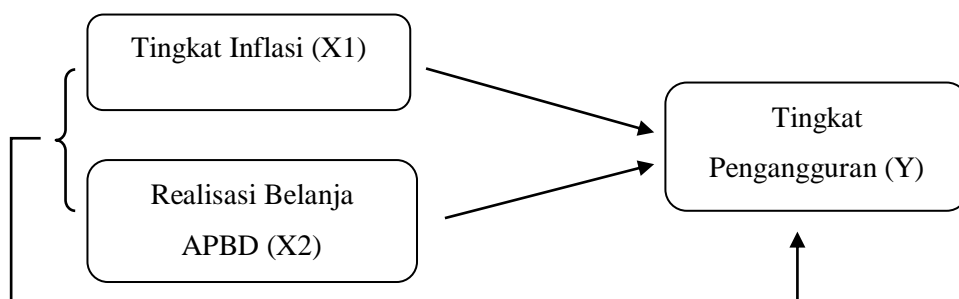
Penelitian yang dilakukan oleh Kairupan (2013) yang menganalisa tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh

PDRB, tingkat inflasi, dan belanja daerah terhadap kesempatan kerja di Propinsi Sulawesi Utara periode 2000-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif dengan teknik analisis regresi linier berganda menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiah, Rahmatiah dan Samhuri (2021) tentang *The Impact of Investment and Government Spending on the Unemployment Rate*. Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi rasio tingkat pengangguran ditinjau dari variabel tingkat investasi dan pengeluaran pemerintah. Metode penelitian dengan data kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data ekonomi makro pemerintah Indonesia tahun 2003 – 2018, meliputi data tingkat investasi pemerintah, data tingkat pengeluaran pemerintah, dan data tingkat pengangguran. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel, yaitu menguji hubungan antara pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya dengan menggunakan program IBM SPSS 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap rasio tingkat pengangguran.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

**Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran**



*Sumber: Diolah Penulis*

Penulis mencoba untuk menguraikan apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, apakah realisasi belanja APBD berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, apakah tingkat inflasi dan realisasi belanja APBD secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibangun di atas maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.
2. Diduga realisasi belanja APBD berpengaruh negatif terhadap pengangguran.
3. Diduga tingkat inflasi dan realisasi belanja APBD berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian adalah pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode ini berawal dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan. Metode ini juga harus menggunakan alat bantu Kuantitatif berupa software Eviews 10 untuk mengolah data tersebut. Kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Sugiyono, 2014).

Sedangkan Jenis Data yang digunakan yakni Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk keperluan penulisan ini, penulis memilih objek di Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Manado sebagai daerah penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dari Januari sampai Februari 2023. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Manado.

### 3.3 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

Untuk mempermudah dan memperjelas variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka dilakukan variabel operasional sebagai berikut:

1. Tingkat Inflasi (X1) merupakan rata-rata tingkat inflasi di Kota Manado dari tahun ke tahun dalam bentuk persen. Data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado dari tahun 2007 – 2021.
2. Realisasi Belanja APBD (X2) merupakan Realisasi Belanja APBD yang sudah di realisasi dari tahun ke tahun. Data diambil dari tahun 2007-2021 yang berasal dari BPS Kota Manado dalam satuan miliar rupiah dan dirubah menjadi logaritma natural.
3. Tingkat Pengangguran (Y) merupakan tingkat pengangguran di kota Manado yang ditentukan oleh pemerintah kota manado dan diolah dan disajikan oleh BPS dari tahun ke tahun. Data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado dari tahun 2007 – 2021 dalam satuan persen.

### 3.3 Metode Analisis Data

#### Teknik Analisis Kuantitatif

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, yakni analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) Dimana analisis data dilakukan dengan cara menguji secara statistic variabel-variabel dengan menggunakan bantuan perangkat lunak. Menurut Sugiyono (2014) analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (naik turunkan nilainya). Menurut Noor (2014) analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan nilai Y. Dengan kata lain, nilai variabel X dapat memperkirakan/memprediksi nilai variabel Y.

Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen nya minimal 2. Jadi, model regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + e_t$$

Dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Terikat)

a = Konstanta

$\beta_1$  &  $\beta_2$  = Koefisien Regresi

e = error term

X1 = Inflasi (Variabel Bebas 1)

t = time series

X2 = Belanja Modal (Variabel Bebas 2)

#### Uji t statistik

Uji t statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013), rumus yang digunakan adalah :

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t : Distribusi t

n : Jumlah data

r : Koefisien korelasi parsial

$r^2$  : Koefisien determinasi

Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut :

- Jika t statistik signifikan > dari  $\alpha$  : H0 diterima

- Jika  $t$  statistik signifikan  $<$  dari  $\alpha$  :  $H_0$  ditolak

### Uji statistik F

Uji statistik F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Jika nilai  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel berarti secara bersama-sama variabel yang ada dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, rumus yang digunakan adalah:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Dimana :

$R^2$  : Koefisien determinasi

$k$  : Jumlah variabel independen

$n$  : Jumlah data diterima

Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut:

- Uji F statistik signifikan  $>$  dari  $\alpha$  :  $H_0$  diterima
- Uji F statistik signifikan  $<$  dari  $\alpha$  :  $H_0$  ditolak

### Koefisien Determinan $R^2$

Koefisien Determinan  $R^2$  merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Jika  $R^2 = 1$  berarti 100 persen total variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya dan menunjukkan ketepatan terbaik. Bila  $R^2 = 0$  berarti tak ada total variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebasnya. Nilai  $R^2$  terletak antara 0 dan 1. Jika  $R^2 = 1$  berarti 100 persen total variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya dan menunjukkan ketepatan terbaik. Bila  $R^2 = 0$  berarti tak ada total variasi terikat yang dijelaskan oleh variabel bebasnya.

### Uji Asumsi Klasik

- Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel dependen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada fungsi linier yang sempurna pada beberapa atau suatu independen variabel dalam fungsi linier (Widarjono, 2013). Cara untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF) dan *tolerance*, apabila VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang dilakukan pada regresi. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Uji heteroskedastisitas yang menggunakan metode *White*. *White* mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan (Widarjono, 2013).
- Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) (Ghozali, 2013). Untuk mengkonfirmasi ada tidaknya autokorelasi pada model regresi ini, maka dilakukan uji runtun. Untuk mengujinya dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Dasar Pengambilan Keputusan Metode pengujian Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Jika nilai durbin-watson lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4dL)$  maka terdapat autokorelasi ; (2) jika nilai durbin-watson terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka tidak ada autokorelasi dan (3) jika nilai durbin-watson terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau diantara  $(4dU)$  dan  $(4-dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Analisis

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

| Dependent Variable: Y      |             |                       |             |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Method: Least Squares      |             |                       |             |          |
| Date: 02/06/23 Time: 21:30 |             |                       |             |          |
| Sample: 2007 2021          |             |                       |             |          |
| Included observations: 15  |             |                       |             |          |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                          | 178.0457    | 50.36485              | 3.535119    | 0.0041   |
| X1                         | -0.063015   | 0.208074              | -0.302850   | 0.7672   |
| ln X2                      | -5.975798   | 1.799428              | -3.320943   | 0.0061   |
| R-squared                  | 0.525549    | Mean dependent var    |             | 12.12000 |
| Adjusted R-squared         | 0.446474    | S.D. dependent var    |             | 3.204992 |
| S.E. of regression         | 2.384492    | Akaike info criterion |             | 4.752706 |
| Sum squared resid          | 68.22965    | Schwarz criterion     |             | 4.894316 |
| Log likelihood             | -32.64530   | Hannan-Quinn criter.  |             | 4.751198 |
| F-statistic                | 6.646196    | Durbin-Watson stat    |             | 1.646608 |
| Prob(F-statistic)          | 0.011406    |                       |             |          |

*Sumber: Data diolah, 2023*

Dari hasil estimasi dapat dinyatakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_t = 178,0457 - 0,063015 X1_t - 5,975798 \ln X2_t + e_t$$

Hasil estimasi persamaan regresi model penelitian diatas dapat diinterpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstan sebesar 178.0457 menyatakan jika nilai tingkat inflasi (X1) dan Realisasi Belanja APBD (X2) adalah konstan (0) maka tingkat pengangguran (Y) adalah sebesar 178.0457.
2. Nilai koefisien variabel tingkat inflasi (X1) diperoleh sebesar -0,063015. Hasil estimasi nilai koefisien regresi ini bertanda negatif dan sesuai dengan apa yang disarankan oleh teori yang menyatakan ada hubungan negatif antara tingkat inflasi (X1) dan tingkat pengangguran (Y). Nilai koefisien sebesar -0,063015 menunjukkan bahwa jika tingkat inflasi naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 0,063%.
3. Nilai koefisien variabel Realisasi Belanja APBD (X2) diperoleh sebesar -5,975798. Hasil estimasi nilai koefisien regresi ini bertanda negatif dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita yang menyatakan ada hubungan negatif antara Realisasi Belanja APBD (X1) dan tingkat pengangguran (Y). Nilai koefisien sebesar -5.975798 menunjukkan bahwa jika Realisasi Belanja APBD naik sebesar 1% maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 5,976%.

### Uji Statistik

#### 1. Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

- Pengaruh Inflasi terhadap tingkat pengangguran berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa variabel inflasi memiliki t-hitung sebesar -0,302 dengan t-tabel sebesar 2,201[ $df = n-k (14-3)$ ,  $\alpha = 5\%$ ]. Hasil ini Menunjukkan bahwa thitung (0,302850) jatuh di daerah sebelah kiri kurva normal (jatuh di daerah penolakan  $H_0$ ) sebab nilai t tabel sebelah kiri kurva normal adalah -2,201. Dengan demikian maka  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  dan  $p > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel inflasi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap terhadap tingkat pengangguran. Pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado adalah negatif artinya jika inflasi meningkat maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan.



- Pengaruh Realisasi Belanja terhadap tingkat pengangguran berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa variabel tingkat inflasi memiliki t-hitung sebesar -3.320943 dengan t-tabel sebesar -2,201 [df= n-k (14-3),  $\alpha = 5\%$ ], sehingga dapat disimpulkan t-hitung > t-tabel, dan hasil yang diperoleh ialah (3,320943 > 2,201), artinya H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga variabel Belanja realisasi APBD (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado.

**2. Pengaruh Secara Simltan (Uji F)**

Dari hasil pengolahan data menunjukan bahwa F hitung variabel inflasi dan Realisasi Belanja APBD adalah 6.646196 dan F tabel adalah 0,083 sehingga diperoleh kesimpulan F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Inflasi dan Realisasi Belanja APBD memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa inflasi dan Realisasi Belanja APBD bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran. Hal ini berarti kenaikan atau penurunan inflasi dan Realisasi Belanja APBD tersebut mempengaruhi Tingkat Pengangguran. Diterimanya hipotesis ini menunjukkan bahwa secara umum inflasi dan Realisasi Belanja APBD memiliki peranan penting didalam pengurangan Tingkat Pengangguran di Kota Manado.

**3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien Determinasi (*R Square* atau R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Kontribusi atau determinasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat dalam uji determinan (R Square). Nilai R-2 didapat dari nilai R sebesar 0,724947, perhitungan nilai koefisien determinasi R<sup>2</sup> sbesar 0,525549. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh inflasi dan Realisasi Belanja APBD sebesar 52 % terhadap pengangguran di kota Manado, dan 48% disumbangkan oleh variabel lain.

**Uji Asumsi Klasik**

**1. Uji Multikolinearitas**

Pengujian Multikolinieritas penelitian bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Variabel dikatakan tidak memiliki kolinearitas apabila nilai korelasi kurang dari 10.

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

| Date: 01/30/23 Time: 21:27 |                      |                |              |
|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sample: 2007 2021          |                      |                |              |
| Included observations: 15  |                      |                |              |
| Variable                   | Coefficient Variance | Uncentered VIF | Centered VIF |
| C                          | 2536.618             | 6691.976       | NA           |
| X1                         | 0.043295             | 3.876974       | 1.310763     |
| X2                         | 3.237940             | 6563.349       | 1.310763     |

Sumber: Data Diolah

Terlihat nilai hasil pengolahan data yang telah dilakukan bahwa nilai korelasi dari variabel yang ada dalam model adalah kurang dari 10 sehingga model ini memenuhi asumsi non multikolinieritas (Gujarati, 2013).

**2. Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai probabilitas Obs\*R-square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai prob nya < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian, sedangkan jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

| Heteroskedasticity Test: White |          |                     |        |
|--------------------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic                    | 0.121280 | Prob. F(5,9)        | 0.9841 |
| Obs*R-squared                  | 0.946867 | Prob. Chi-Square(5) | 0.9667 |
| Scaled explained SS            | 0.377256 | Prob. Chi-Square(5) | 0.9959 |

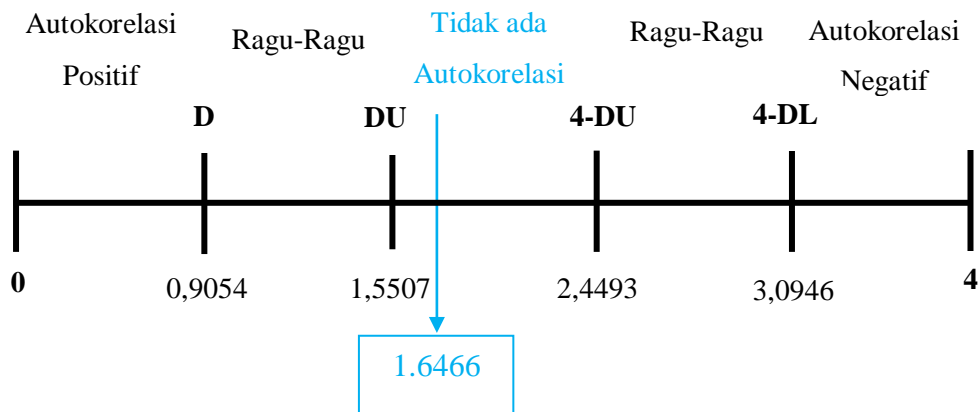
Sumber: Data Diolah

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *white*, nilai prob nya sebesar  $0.9667 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian.

**3. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi. Autokorelasi mengindikasikan adanya hubungan antara satu residual observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

**Gambar 2. Kriteria Keputusan Menurut Uji Statistik Durbin Watson**



Sumber: Data Diolah

Ternyata nilai DW sebesar 1.646608 terletak pada daerah tidak ada Autokorelasi, terletak pada daerah DU dan 4-DL, maka menerima  $H_0$  dan  $H_0^*$  berarti model persamaan regresi dalam penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

**4.2 Pembahasan**

**1. Pengaruh Inflasi Terhadap Pengangguran**

Hasil pengujian memiliki sedikit berbeda karena hasil yang didapatkan negatif tapi tidak signifikan namun memiliki korelasi dengan teori Kurva Phillips yang meyakini pengangguran akan turun apabila inflasi naik. Pada Kurva Phillips jangka panjang, terjadinya pengangguran pada jumlah tertentu akan mendorong pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif untuk menekan angka pengangguran, dampak dari kebijakan tersebut akan meningkatkan permintaan agregat meskipun mendorong naiknya angka inflasi. Hasil pengujian yang didapatkan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lamatenggo, Walewangko dan Layuck (2019) tentang pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran di kota manado yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran, yang artinya pada saat inflasi naik maka tingkat pengangguran akan menurun.

**2. Pengaruh Realisasi Belanja APBD Terhadap Tingkat Pengangguran**

Berdasarkan hasil regresi, variabel Realisasi Belanja ( $X_2$ ) memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran di Kota Manado selama periode 2007-2021. Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahwa pengeluaran atau belanja yang dilakukan pemerintah adalah untuk mendorong

perekonomian, dalam hal ini terbukannya lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa Realisasi Belanja APBD Kota Manado terbukti mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran lewat kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaharudin (2019) tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan (studi kasus pada kota manado tahun 2001-2017), dimana belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di kota Manado pada tahun 2001-2017.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila tingkat inflasi naik maka tingkat pengangguran menurun.
2. Realisasi Belanja APBD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado. Pemerintah lewat sudah baik dalam menggunakan belanja APBD-nya sehingga peningkatan belanja yang terealisasi dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kota Manado.
3. Tingkat Inflasi dan Realisasi Belanja APBD secara simultan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kota Manado Dalam Angka (2008–2022 ed.)*. Badan Pusat Statistik Kota Manado.
- Badrudin, R. (2011). *Ekonomi Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Bratakusumah, Supriady, D., & Solihin, D. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivarriant dengan program IBM SPSS (7 ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat.
- Islamiah, N., Rahmatiah, Zamhuri, M. Y., & Paddu, A. H. (2021). The Impact of Investment and Government Spending on the Unemployment Rate. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(1).
- Kaharudin, R., Kumenaung, A. G., & Niode, A. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4).
- Kairupan, Siestri, P. (2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Dan Belanja Daerah Pengaruhnya Terhadap Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara Tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 2143–2263.

- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., & Layuck, I. A. C. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2).
- Mankiw, N. G. (2018). *Pengantar Makro Ekonomi*. Salemba Empat.
- Menteri Dalam Negeri. (t.t.). *Permen-No.13-2006*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro (Revisi)*. PT. Refika Aditama.
- Noor, J. (2014). *Metodologi Penelitian*. Kencana Prenada Media Grup.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *UU Nomor 32 Tahun 2004*.
- Putong, & Iskandar. (2010). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Mitra Wacana Media.
- Rotinsulu, D. Ch., Tenda, A. R., & Luciana, L. M. (2016). Analisis Dampak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sambaulu, R. A., Rotinsulu, T. O., & Lopian, A. L. Ch. P. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Susanto, E., Rochaida, E., & Ulfa, Y. (2017). Pengaruh Inflasi Dan Pendidikan Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan. *INOVASI*, 13, 19–27.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Ekonosia.